

## **Peran Humas Setjen DPR RI Dalam Mengelola Citra Positif**

*The Role of Public Relations of the DPR RI in Manage a Positif  
Image*

---

**Ida Royandiah<sup>1</sup>**

**Yonarisman Muhammad Akbar<sup>2</sup>**

**Raesita Rakhmawati Rosadi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka  
Alamat: Jl. Pd. Cabe Raya, Pd. Cabe Udik, Kec. Ciputat, Kota Tangerang  
Selatan, Banten 15418

Idar@ecampus.ut.ac.id, yonarismanakbar@ecampus.ut.ac.id,  
Resitarosadi@ecampus.ut.ac.id

---

Dikirim:21 Oktober 2022, Direvisi: 30 Desember 2022, Diterima:  
31 Desember 2022, Terbit: 31 Desember 2022.

Sitasi:Royandiah,dkk, (2022), Peran Humas Setjen DPR RI  
Dalam Mengelola Citra Positif, Promedia. Volume 8 (2),  
Desember 2022, Hal 203- Hal 219

---

### ***Abstract***

*Public Relations or Public Relations (PR) is considered important for a government agency. Public relations have a role in creating the image of the organization, communicating all forms of information about the organization to the public. The DPR RI as a state institution is currently declining in electability and the image of the DPR RI as a state institution in the eyes of the Indonesian people has not improved. In addition to the performance of the DPR RI which must be improved, of course public relations as the front page of the institution, plays a major role in turning this negative image into a positive image. This research will look at the role of DPR RI Public Relations in maintaining its reputation in the public eye. This study uses a qualitative method in which*

*researchers conduct literature reviews, observations, and in-depth interviews related to the topics studied. The results of observations and interviews obtained were then analyzed using the elements found in public relations communication, namely external communication. Based on the results of this study it was found that the Speaker of the DPR RI and the Deputy Speaker of the DPR RI were also involved as speakers. The Parliamentary News Bureau handles negative news, while public relations is in charge of carrying out public information services and community visits, implementing promotion, dissemination and public education, as well as fostering and managing museums.*

***Keywords: Government Public Relations, Institutional Image, DPR RI***

---

### **Abstraksi**

*Public Relation* atau Hubungan Masyarakat (humas) sudah di anggap penting bagi sebuah lembaga pemerintahan. Humas memiliki peran dalam menciptakan citra organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi kepada publik. DPR RI sebagai lembaga negara saat ini elektabilitasnya menurun dan tidak kunjung baiknya citra DPR RI sebagai lembaga negara di mata masyarakat Indonesia. Selain kinerja DPR RI yang harus ditingkatkan, tentu saja humas sebagai halaman depan lembaga, berperan besar dalam mengubah citra negatif ini menjadi citra positif. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran Humas DPR RI dalam menjaga reputasinya di mata publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana peneliti melakukan kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam terkait topik yang diteliti. Hasil observasi dan wawancara yang didapat kemudian dianalisis menggunakan elemen yang terdapat pada komunikasi humas yaitu komunikasi eksternal. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Ketua

DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI turut terlibat menjadi speaker. Biro Pemberitaan Parlemen menangani pemberitaan negative, sementara humas bertugas melaksanakan pelayanan informasi public dan kunjungan masyarakat, pelaksanaan promosi, diseminasi dan edukasi public, serta pembinaan dan pengelolaan museum.

**Kata Kunci:** *Humas Pemerintahan, Citra Lembaga, DPR RI*

---

## I. PENDAHULUAN

Peran humas dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Dalam riset tentang kegiatan humas (*public relations*), ada dua peran besar yang secara konsisten muncul dalam kegiatan humas yaitu peran sebagai teknisi dan manajemen. Peran sebagai teknisi mewakili seni dari humas seperti menulis, mengedit, mengambil foto, menangani produksi komunikasi, membuat Event spesial, dan melakukan kontak telepon dengan media. Peran sebagai manajer berfokus pada kegiatan yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait humas. Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore, 2010).

DPR RI sebagai lembaga negara yang sah yang memiliki 3 fungsi utama yaitu: Pertama, sebagai fungsi legislasi sebagai lembaga yang berfungsi dalam mengusulkan, membuat, dan mengesahkan undang-undang. Kedua sebagai fungsi anggaran, menyusun serta mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketiga sebagai fungsi pengawasan dimana DPR sebagai lembaga legislatif berfungsi mengawasi kinerja lembaga eksekutif dalam hal ini presiden dan para menternya. Selain fungsi-fungsi tersebut DPR RI juga berperan sebagai wakil rakyat di pemerintahan. Para anggota DPR RI lah yang bertugas

menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Namun yang terjadi saat ini adalah DPR RI sering menjadi perbincangan publik. Banyak hal yang membuat citra DPR RI menjadi beraneka ragam dimata masyarakat, baik itu citra positif maupun citra negatif.

Dari beberapa peran dan fungsi inilah yang menjadikan DPR RI sebagai organisasi yang wajib memiliki reputasi baik guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang diwakilinya. Keberadaan DPR RI dalam pemerintahan sebagai lembaga politik dituntut adanya reputasi positif dalam lembaga ini. Reputasi positif ini ditujukan agar publik atau masyarakat dapat mempercayai kinerja para wakil rakyatnya dan menciptakan kepercayaan kepada lembaga DPR. Reputasi positif dibutuhkan supaya tugas dan kewajiban para anggota DPR dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerima semua hasil kerja DPR, yaitu pembuat undang-undang, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dan menyusun APBN.

Berdasarkan survei yang dilakukan Fixpoll tahun 2021 terhadap kepuasan masyarakat atas kinerja DPR RI jika dilihat berdasarkan kinerja lembaga memiliki tingkat kepuasan terendah. Kepuasan kinerja DPR RI hanya 15,1 persen responden merasa puas dengan kinerja para anggota dewan. Sebanyak 39,8 persen tidak puas dengan kinerja wakil rakyat di Senayan. Survei dilakukan dengan multistage random sampling. Dengan jumlah sampel 1.240 orang. Margin of Error di bawah 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95,0 persen (Fixpoll, 2021). Data survei tersebut sejalan dengan pemberitaan tentang DPR RI sebagai lembaga negara yang sedang diterpa pemberitaan negatif terkait demo mahasiswa pada saat menolak RUU Omnibuslaw dan RUU KPK serta pemberitaan yang mengganggu citra dan reputasinya. Hal ini merupakan bentuk apresiasi masyarakat dan keingintahuan masyarakat luas tentang hal yang berkaitan dengan DPR RI atau lembaga negara Indonesia. Dan sering kali citra DPR RI lebih dikaitkan kearah citra yang negatif, sehingga sangat diperlukan

sumber daya manusia khusus untuk dapat menangani maupun mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tentang DPR RI.

Merujuk pada banyaknya pemberitaan negatif terhadap DPR RI sebagai lembaga negara, maka diperlukan peran *Public Relations* atau humas yang baik guna dapat mempublikasikan kinerja anggota dewan dan keputusan lembaga demi menjaga reputasi positif kinerja anggota dewan. Peran humas sangat diperlukan dalam hubungan antara lembaga dan publiknya, menciptakan citra baik bagi Lembaga (*corporate image*) dan membina *relationship* positif dan saling menguntungkan dengan publiknya (Saputra & Nasrullah, 2011).

Adapun teori-teori yang menjelaskan dan menjadi landasan guna untuk mengarahkan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Istilah komunikasi atau dalam bahas Inggris communication berasal dari kata Latin communication, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, jika dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan (Effendy, 2013). Menurut Berelson dan Steiner, komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain.

Ross (1983:8) dalam Wiryanto (2004) mengatakan komunikasi adalah proses di mana simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, diterima dan diberi arti. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang diucapkan melalui oral (lisan) atau dapat juga ditulis, seperti mengobrol lewat telepon atau berjabat tangan secara langsung. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak dapat diucapkan melalui oral (lisan) seperti gerak tubuh, ekspresi serta sinyal.

## 2. Definisi Public Relation

“As publicity is a tool of public relations, so public relations is a tool of marketing”. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa publisitas adalah alat dari Public Relations menjalin hubungan dengan masyarakat, begitu pula seorang Public Relations juga sebagai alat dalam hal pemasaran.

Pengertian “public” adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik merupakan grup kecil, terdiri atas orang-orang dengan jumlah sedikit, juga dapat merupakan sekelompok besar. Begitu juga dengan pengertian “relations” yang berasal dari bahasa Inggris “hubungan”. Penggunaan relations dalam public relations mengandung arti adanya hubungan yang timbal balik atau two-way-communications.

Secara umum ada dua macam, yaitu Humas Pemerintah (Government Public Relations) dan humas perusahaan (Coporate Public Relations). Humas yang berada pada lembaga publik peran, fungsi dan tugasnya sama dengan humas pada lembaga pemerintahan. Pentingnya keberadaan humas bagi sebuah organisasi sudah semakin banyak disadari. Humas membuat dan membantu perusahaan dalam menciptakan, membangun, dan menjaga citra dan reputasi dimata publik.

Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis, divisi humas dalam institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan mereka, memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat (Kusumawati, 2004: 37).

Frank Jefkins (1992) mendefinisikan humas “is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its public” yang

artinya humas merupakan aktifitas terencana dan terus menerus untuk membangun dan menjaga iktikad baik dan pengertian bersama antara organisasi dan publik.

### **3. Fungsi Public Relation**

Keberadaan seorang PR dalam suatu perusahaan tentu saja mempunyai fungsi utama yang harus dilakukan. Fungsi utama PR menurut Anne van der Meiden dalam buku *Public Relations een Kennismaking* (1987) sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan, mengembangkan hubungan baik antara organisasi/perusahaan dengan publiknya baik internal maupun eksternal;
- b. Menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan meningkatkan partisipasi publik;
- c. Menciptakan opini publik yang menguntungkan organisasi/perusahaan dan publik.

Public Relations adalah fungsi manajemen yang unik yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi, memunculkan pemahaman, kerja sama antara organisasi dan publiknya; melibatkan manajemen permasalahan isu; membantu manajemen untuk terus menginformasikan dan tanggap terhadap opini publik; mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum; membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, melayani sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah kecenderungan negatif; dan menggunakan penelitian yang sehat dan etika komunikasi sebagai alat utamanya. (Harlow, 1976:36).

Fungsi Public Relations menurut Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A. dalam bukunya, *Hubungan Masyarakat Suatu Komunikologis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992) adalah sebagai berikut:

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi;
2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan publik eksternal;
3. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada organisasi;
4. Melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum;
5. Operasional dan organisasi public relations adalah bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya.

#### **4. Boundary Spanning**

Boundary spanning merupakan salah satu ciri dari sifat organisasi yang merupakan sistem terbuka (Kriyantono, 2014: 88). Sistem terbuka disini adalah terdapatnya interaksi antara organisasi dengan lingkungannya untuk melakukan monitoring, seleksi, dan menghimpun informasi. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Heath yang mengatakan bahwa “organisasi tidak dapat bergantung hanya pada proses dan interaksi internal seperti yang dilakukan sistem tertutup. Organisasi harus berinteraksi dengan kelompok lainnya.”

(Kriyantono, 2014) menyebutkan beberapa aktivitas pelaksanaan fungsi boundary spanning yang dapat dilakukan oleh praktisi public relations, yaitu:

1. Menjelaskan informasi tentang organisasi kepada publik (lingkungannya).
2. Memonitor lingkungannya sehingga mengetahui apa yang terjadi dan menginterpretasi isu-isu yang potensial memengaruhi aktivitas organisasi dan membantu

manajemen merespons isu-isu tersebut melalui aktivitas isu manajemen.

3. Membangun sistem komunikasi dua arah dengan publiknya agar organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

## **5. Teori Excellence**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Excellence. Excellence theory adalah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan pengetahuan teoritis dan penemuan penelitian oleh The Internasional Association of Business Communicators (IABC). Kajian ini dilakukan oleh James E. Gruning dari Universitas Maryland (Ardianto, 2010). Dikutip dari (Kriyanto, 2014) teori ini merupakan pengembangan dari empat model public relations (Grunig, 1984) dan teori situational of the public (Grunig, 1979).

Teori ini menjelaskan peran public relations menyediakan saluran komunikasi dua arah timbal balik, yang memungkinkan organisasi dan publik berbagi informasi dan menyampaikan gagasan. Agar pesan ini berjalan baik, public relations mesti mengombinasikan peran sebagai teknisi dan manajer yang baik. Kekuatan utama teori ini adalah asumsinya bahwa komunikasi simetris adalah praktik humas yang paling efektif dan beretika yang menekankan pada dialogis. Komunikasi simetris merepresentasikan orientasi hubungan antara organisasi dengan publiknya karena menekankan pada terbangunnya pengertian bersama (Kent & Taylor, 2005).

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi wawancara dan literature. Wawancara dilakukan di mana peneliti melakukan depth interview dengan Kepala Bagian Humas dan Museum DOR RI, Ibu Minarni, M.Si dan juga literatur dari buku, jurnal, berita online dan tulisan lain yang berhubungan

dengan penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan landasan teoritis yang sesuai. Analisis data dilakukan dengan cermat sesuai dengan data yang dikumpulkan baik dalam bentuk dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Semua hasil wawancara dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini tertulis dalam bagian daftar pustaka yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tulisan ini.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **Humas Setjen DPR RI**

Peran lembaga kehumasan dalam keterbukaan informasi publik memiliki posisi yang strategis, ini bertujuan untuk mengawal dan mewujudkan tata kelola negara yang bersih, profesional dan berwibawa. Sebagai komunikator publik, fungsi humas menyosialisasikan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarkan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja lembaganya kepada masyarakat.

Terkait dengan fungsi dan tugas peran humas DPR RI, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan Museum, Minarni (04 Agustus 2022), menurut Minarni terdapat kesalahpahaman tentang peran Humas DPR RI. Peran Humas DPR RI berbeda dengan lembaga pemerintah lain. Jika di lembaga pemerintah lain, peran Humas adalah sebagai speaker. Seperti untuk meng-counter berita negatif di luar terhadap sebuah Lembaga. Di DPR RI tidak. Speaker DPR RI adalah Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI (Pimpinan) serta satuan kerja yang bertugas meng-counter berita-berita negative di DPR RI adalah Biro Pemberitaan Parlemen, bukan Humas. Biro Pemberitaan Parlemen juga yang mengeluarkan release resmi DPR RI kepada media maupun publik secara umum.

Sebagai referensi tambahan, mengutip dari laman web HUMAS DPR RI (2021):

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI disebutkan bahwa Sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Sekretariat Jenderal.

Dalam struktur organisasi, Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum berada di dalam ruang lingkup Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat dan dibawah koordinasi Deputy Bidang Persidangan. Tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum tertuang pada Pasal 173 terkait layanan kunjungan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Kunjungan Masyarakat
- Pelaksanaan Promosi, Diseminasi dan Edukasi Publik
- Pembinaan dan Pengelolaan Museum

#### **Sub Informasi Pelayanan Kunjungan Masyarakat**

Tugas pokok dan fungsi Pelayanan Informasi Publik yaitu, memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait tugas-tugas kedewanan, dan informasi yang diberikan semua kaitannya dengan DPR RI, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut seperti yang dijabarkan Minarni, Kepala Bagian Humas dan Museum:

“Informasi yang disampaikan harus mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan informasi yang kita sampaikan pun tentunya harus betul-betul informasi yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat, terkecuali informasi yang dalam Undang-Undang Bab V Pasal 17 ada beberapa informasi yang dikecualikan tidak boleh disampaikan kepada masyarakat.”

Tentu peran Pelayanan Informasi Publik haruslah terbuka kepada masyarakat mengenai informasi data yang diberikan, akan tetapi terdapat beberapa data yang dapat dikecualikan diberikan

kepada masyarakat seperti pada UU Bab V Pasal 17 yang menjelaskan pengecualian data yang tidak boleh diberikan apabila data dibuka dan diberikan kepada masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan lain sebagainya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelayanan PPID di DPR RI ditugaskan di bagian Humas. Jadi melalui bagian ini masyarakat dapat menanyakan risalah pembahasan RUU dan informasi lainnya. Selain itu, sub ini juga melayani kunjungan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat yang melakukan unjuk rasa (unras) akan ditemui oleh sub ini dan perwakilannya ditanyakan ingin bertemu dengan siapa di DPR RI. Biasanya, mereka ingin bertemu dewan ataupun sekretariat.

#### **Sub Promosi, Diseminasi dan Edukasi Publik**

Tugas dari sub ini adalah melakukan promosi dan edukasi publik tentang keparlemen. Core pekerjaannya adalah melakukan edukasi terkait demokrasi parlemen khususnya DPR RI. Ini dilakukan setiap hari untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat. Selain itu Humas DPR RI juga memiliki program tahunan, diantaranya adalah program Parlemen Remaja dan Parlemen Kampus.

Parlemen Remaja adalah kegiatan yang memiliki sasaran siswa-siswi SMA di Indonesia dan nantinya akan simulasi menjalankan peran anggota DPR RI dalam pelaksanaan rapat fraksi, rapat kerja, dan rapat paripurna. Mereka akan dipilih sebanyak 130 orang sesuai dengan keadaan real terdapat 80 daerah pemilihan dewan. Proses seleksinya melalui penilaian essay, video kampanye dan CV yang kemudian dilaksanakan selama 5 hari disertai juga dengan kunjungan kerja (kunker) kepada instansi sesuai dengan tema. Di akhir program akan dipilih peserta terbaik se-Indonesia. Keikutsertaan peserta pun dibatasi hanya maksimal 1 kali. Jika

belum berhasil lolos maka siswa-siswi dapat mengikuti maksimal hingga kelas XII.

Sementara Parlemen Kampus adalah kegiatan yang ditujukan kepada Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Kegiatan ini berbentuk sidang parlemen. Terdapat perbedaan dengan Parlemen Remaja, Parlemen Kampus hanya dilakukan selama dua hari. Kegiatan acara dikelola oleh organisasi suatu kampus. Namun, Humas DPR RI tetap memberikan aturan dan tata tertibnya. Selain itu sub ini juga melakukan tugasnya dengan melakukan Pameran dalam rangka mensosialisasikan tugas, fungsi dan kinerja DPR RI sekaligus mengedukasi tentang parlemen. Pada saat ini Pameran DPR RI pun dilakukan melalui TV Parlemen dan Radio Parlemen. Kedua kanal TV dan Radio Parlemen inipun turut menyiarkan aktivitas dan output DPR RI kepada masyarakat luas.

#### **Sub Pengelolaan Museum**

Sub ini bertugas untuk mengelola museum DPR RI. Museum DPR RI ini adalah medium pembelajaran sejarah DPR dari zaman dulu hingga sekarang. Museum DPR RI dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Terdapat dua bentuk Museum yaitu fisik dan virtual. Kunjungan Museum DPR secara fisik disebut dengan Tour Building Museum. Peserta dapat juga kami ajak ke Balkon Ruang Sidang DPR untuk sidang terbuka sehingga dapat menyaksikan langsung bagaimana sidang berjalan. Selama pandemi, museum virtual tercetus untuk diimplementasikan.

#### **Esensi Humas DPR RI**

Esensi utama Humas DPR RI yaitu mengedukasi masyarakat tentang Keparlemenan dituangkan dalam program-program inovatif yang cukup menarik seperti Parlemen Remaja dan Parlemen Kampus. Hal ini didukung dengan penggunaan media social akun Edukasi Parlemen yang mudah diakses oleh masyarakat. Secara hasil, program Parlemen Remaja memiliki tingkat kesuksesan yang cukup menarik. Pada tahun 2019, terdapat total 12.000 siswa yang mendaftar program ini dari seluruh

Indonesia dan yang diterima adalah 130 orang. Namun sayangnya, angka tersebut masih jauh dengan jumlah siswa SMA di Indonesia pada tahun yang sama. Menurut Kemendikbud (2016) terdapat 4,976,127 orang siswa SMA di Indonesia dari rentang kelas X - XII. Ditambah lagi program Parlemen Remaja ini hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Apabila Humas DPR RI ingin mengoptimalkan program Parlemen Remaja ini, maka frekuensi penyelenggaraan dapat ditingkatkan serta dapat dilakukan Kerjasama dengan DPRD di seluruh Indonesia untuk melakukan Program serupa. Selain untuk memasifkan edukasi parlemen melalui praktik langsung yaitu simulasi seperti ini, harapannya akses keterlibatan peserta di daerah pun akan meningkat pesat karena jarak kantor DPRD tidak terlalu jauh dibandingkan lokasi kantor DPR RI di Jakarta.

Edukasi parlemen virtual yang selanjutnya disebut edukasi parlemen #dirumahaja dilakukan pada bulan April 2020, pada saat Presiden RI Bpk. Joko Widodo menyarankan untuk beraktifitas di rumah. Begitu juga dengan parlemen remaja virtual dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021. Selain akan mengefisiensikan anggaran pelaksanaan, akses keikutsertaan juga dapat turut meningkat. Terlebih apabila kedua bentuk kegiatan fisik dan virtual ini dapat dilaksanakan secara simultan maka akan dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Untuk Parlemen Kampus yang bersifat per-kampus agaknya masih kurang efektif jika tujuannya adalah memasifkan edukasi parlemen kepada mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia. Hasil evaluasi Parlemen Kampus tidak didapatkan dalam wawancara langsung ini. Untuk itulah sebaiknya Humas DPR RI selain melakukan inovasi teknis acara, sebaiknya juga melakukan evaluasi holistic secara berkala agar tujuan memasifkan edukasi parlemen kepada anak muda di Indonesia dapat meluas. Konsep Parlemen Remaja dan Kampus juga dapat dikembangkan untuk masyarakat pasca usia sekolah misalkan nama kegiatannya adalah

Parlemen Rakyat yang diperuntukkan kepada masyarakat lintas profesi dan umum. Karena bagaimanapun, edukasi parlemen tidak cukup hanya untuk bangku sekolah maupun universitas tetapi juga masyarakat luas.

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, penelitian dapat dilanjutkan kepada Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dalam mengetahui bagaimana peran dan fungsi biro tersebut dalam merepresentasikan DPR RI melawan berita-berita ataupun persepsi-persepsi negatif masyarakat Indonesia terhadap DPR RI. Terlebih menurut penelitian yang dilakukan di 34 Provinsi se-Indonesia, Litbang Kompas (2022) menemukan fakta lapangan bahwa citra DPR hanya berada di angka 44,4 persen (dari 100 persen) dan masih jauh di bawah citra Lembaga-lembaga negara lainnya. Sebesar 78,7 persen responden mengatakan Lembaga legislatif ini belum memperjuangkan aspirasi dan kepentingan publik. Artinya Humas DPR RI sebagai actor edukasi parlemen perlu terus mengupayakan strategi peningkatan edukasi kepada masyarakat. Karena jika asumsinya adalah di setiap Lembaga pemerintah terdapat “oknum-oknum” yang melanggar, mengapa DPR RI masih lebih rendah citranya dibanding Lembaga pemerintah lainnya. Artinya, peran edukasi parlemen masih belum maksimal dan mungkin juga terdapat korelasi performa dengan Biro Pemberitaan Parlemen.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdapat perbedaan peran Humas di DPR RI dengan Humas di Lembaga pemerintah pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada pemisahan fungsi Humas DPR hanya sebagai unit Edukasi Parlemen kepada masyarakat berbagai kalangan ditambah pengelolaan Museum DPR RI. Adapun fungsi dalam melawan berita negatif Lembaga DPR RI ditugaskan kepada Speaker yaitu Ketua DPR RI dan unit teknisnya adalah Biro Pemberitaan Parlemen, unit diluar Humas DPR RI. Humas DPR RI memiliki 3

fungsi yang tercermin dalam 3 sub Bagian Humas. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang berfungsi untuk memberikan informasi dan dokumen terbuka kepada masyarakat serta menerima kunjungan masyarakat, sub Promosi, Diseminasi, dan Edukasi Publik yang berfungsi memberikan edukasi parlemen baik melalui program simulasi parlemen maupun pameran, dan sub-Pengelolaan Museum yang berfungsi untuk menyajikan konten fisik dan non-fisik sejarah dan peran DPR RI kepada masyarakat luas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Uchjana, Onong, 1992. *Hubungan Masyarakat Suatu Komunikologis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Effendy, Uchjana, Onong. 2013. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Fixpoll Research and Strategic Consulting (2021) “*Kepuasan Masyarakat atas Kinerja DPR RI*” Menurut Lembaga Fixpoll 2021, diakses pada 16-27 Juli 2021, tersedia pada <https://www.merdeka.com/politik/survei-fixpoll-kepuasan-masyarakat-atas-kinerja-dpr-mpr-dan-dpd-rendah.html>
- Grunig, James E. *Excellence Theory in Public Relations*. 2014. University of Maryland
- Guritno, Tatang. 2022. *Survei Litbang ‘Kompas’: Citra DPR Kembali Merosot. Diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/10091871/survei-litbang-kompas-citra-dpr-kembali-merosot> pada 4 November 2022 pukul 15.30 WIB.*
- Harlow, Rex F. (1976). *Building a Public Relations Definition*. *Public Relations Review* 2 No.4

HUMAS DPR RI PROFILE diakses dalam  
<https://humas.dpr.go.id/index/profile> pada 4 November  
2022 pukul 15.00 WIB.

Jefkins, Frank. (1992). *Public Relations Edisi 4*. Jakarta: Erlangga

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
(2016). *Statistik Pendidikan : Jumlah Siswa Menurut  
Umur/Kelompok Umur Tiap Provinsi di Indonesia Tahun  
Ajaran 2019/2020*. (2016). Diakses dalam  
<https://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/sma>  
pada 4 November 2022.

Kent, Taylor. 2005. *How Intercultural Communication Theory  
Informs Public Relations Practice in Global Settings*  
diterbitkan dalam *Public Relations in Global Cultural  
Contexts: Multi-Paradigmatic Perspectives*.  
London:Routledge.

Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*.  
Jakarta : Prenadamedia Group

Kusumawati, Frida.(2004). *Dasar-Dasar Humas*. Jakarta: Ghalia  
Indonesia.

Lattimore, dkk. 2010. *Public Relations: Profesi dan Praktik*.  
Jakarta: Salemba Humanika

Raymond S. Ross, buku “*Speech Communication; Fundamentals  
and practice*” (1983: 8). Mishawaka. U.S.A., Wiryanto

Saputra, Wahidin dan Rulli Nasrullah. 2011. *Teori dan Praktik  
Publik Relations*. Depok : Gramata Publishing

Wawancara Langsung Kepala Humas DPR RI oleh Tim Peneliti  
*Jurusan Komunikasi Universitas Terbuka di Sekretariat  
DPR RI pada hari Kamis 06 Agustus 2022 pukul 11.15 WIB*